

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA
PERSPEKTIF KELAS DAN KEKUASAAN DALAM SOSIALISME MARXIST
DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

Deki Pardana^{*1}, Rabiatul Jasyah², Suriadi³, Rusdin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding author: deki.pardana@umbuton.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Oktober 2024</p> <p>Revised : 08 November 2024</p> <p>Accepted : 02 Desember 2024</p> <p>Publication : 30 Desember 2024</p> <p>Keywords: <i>Political Participation, Elections, Marxist Socialism</i></p> <p>Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pilkada, Sosialisme Marxis.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>	<p>Abstract: <i>The socialization of political participation in the 2024 Simultaneous Regional Elections in South Buton Regency was carried out by the Panwaslu of Batuatas Sub-district with the aim of increasing public awareness of their voting rights and political roles. This socialization uses a Marxist socialism perspective to explain how social class and power influence the political process. The methods used included discussions, seminars and the utilization of social media to reach more layers of society. The results show an increase in political understanding, especially among marginalized groups, as well as increased participation in election monitoring. With more critical political awareness, the community is expected to elect leaders who truly represent the interests of the people and maintain the integrity of local democracy. This activity contributes to efforts to build a more inclusive and equitable political system in South Buton District.</i></p> <p>Abstrak: Kegiatan sosialisasi partisipasi politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Buton Selatan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batuatas dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak pilih dan peran politik mereka. Sosialisasi ini menggunakan perspektif sosialisme Marxist untuk menjelaskan bagaimana kelas sosial dan kekuasaan memengaruhi proses politik. Metode yang digunakan meliputi diskusi, seminar, dan pemanfaatan media sosial guna menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman politik, terutama di kalangan kelompok terpinggirkan, serta meningkatnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Dengan kesadaran politik yang lebih kritis, masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat serta menjaga integritas demokrasi lokal. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap upaya membangun sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Buton Selatan.</p>
---	--

INTRODUCTION

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerahnya. Namun, dalam praktiknya, partisipasi politik tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Faktor sosial dan ekonomi sering kali menjadi penentu utama tingkat keterlibatan warga dalam proses politik. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu daerah yang akan menggelar pemilihan, menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi politik warganya. Oleh karena itu, kajian mengenai partisipasi politik dalam perspektif kelas dan kekuasaan menjadi penting untuk memahami pola keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Menurut Brown (2020) dari sudut pandang sosialisme Marxist, partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari struktur kelas sosial yang ada. Kelas pekerja dan kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap sumber daya politik sering kali mengalami hambatan dalam berpartisipasi aktif dalam pemilu. Pilkada sering kali lebih didominasi oleh kelas ekonomi menengah ke atas yang memiliki modal politik lebih besar, baik dalam bentuk jaringan sosial maupun sumber daya ekonomi. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik yang dapat memperkuat status quo kekuasaan dan melemahkan demokrasi partisipatif. Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, perlu adanya pendekatan khusus untuk memahami bagaimana faktor kelas sosial mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih serta bagaimana strategi sosialisasi dapat memperkecil kesenjangan tersebut.

Sebagai wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam, Kabupaten Buton Selatan memerlukan strategi sosialisasi yang inklusif agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam Pilkada Serentak 2024. Sosialisasi politik yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti akses terhadap informasi, pendidikan politik, dan keberpihakan kebijakan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan. Pendekatan berbasis sosialisme Marxist dapat membantu mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu dan menawarkan solusi agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih adil dalam proses politik.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Buton Selatan dapat lebih memahami hak politiknya serta dampak dari ketimpangan kelas dalam sistem demokrasi. Dengan membangun kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan dan bagaimana partisipasi politik dapat menjadi alat perubahan sosial, masyarakat akan lebih

terdorong untuk berperan aktif dalam Pilkada. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan politik, bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk perjuangan kelas dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian diharapkan tingkat partisipasi politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Buton Selatan dapat meningkat secara signifikan, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang selama ini cenderung terpinggirkan. Sosialisasi berbasis perspektif sosialisme Marxist ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran politik yang lebih kuat, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pilkada tidak lagi menjadi sekadar rutinitas politik lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi ajang demokrasi yang mencerminkan kehendak rakyat secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, mencakup berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya melalui penyuluhan langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial dan diskusi kelompok yang melibatkan akademisi, aktivis, serta tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, informasi mengenai pentingnya partisipasi politik dapat tersebar lebih luas dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan politik. Selain itu, kegiatan ini juga harus memperhitungkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat agar metode sosialisasi yang digunakan lebih efektif dan dapat diterima oleh berbagai kelompok.

Menurut Fuentes (2014) salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi politik adalah adanya ketimpangan akses terhadap informasi dan pendidikan politik. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sering kali kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya suara mereka dalam pemilu. Faktor ini diperparah dengan adanya praktik politik uang dan mobilisasi massa oleh elite politik yang dapat mengaburkan makna partisipasi demokratis. Oleh karena itu, political platform sosialisasi ini harus berupaya menanamkan kesadaran bahwa partisipasi politik bukan sekadar menggunakan hak pilih, tetapi juga merupakan bentuk perjuangan kelas yang dapat menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerah mereka.

Menurut Plys dan Goonewardena (2023). Dalam perspektif sosialisme marxist, politik bukanlah arena yang netral, melainkan cerminan dari hubungan kekuasaan antara kelas-kelas dalam masyarakat. Oleh sebab itu, computer program sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemilu, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana struktur kekuasaan bekerja dan bagaimana mereka dapat menggunakan hak politiknya untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Dengan memahami bahwa sistem demokrasi yang ada sering kali lebih menguntungkan kelompok elite, masyarakat dapat lebih waspada terhadap berbagai bentuk manipulasi politik yang dapat melemahkan posisi mereka dalam proses demokrasi.

Selain itu, penting untuk membangun solidaritas antarwarga dalam memperjuangkan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sosialisasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Buton Selatan, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menyoroti permasalahan ini dalam diskusi dan kampanye politik, masyarakat dapat lebih memahami bahwa pemilu bukan sekadar memilih individu, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Kesadaran politik semacam ini akan memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemimpin yang mereka pilih.

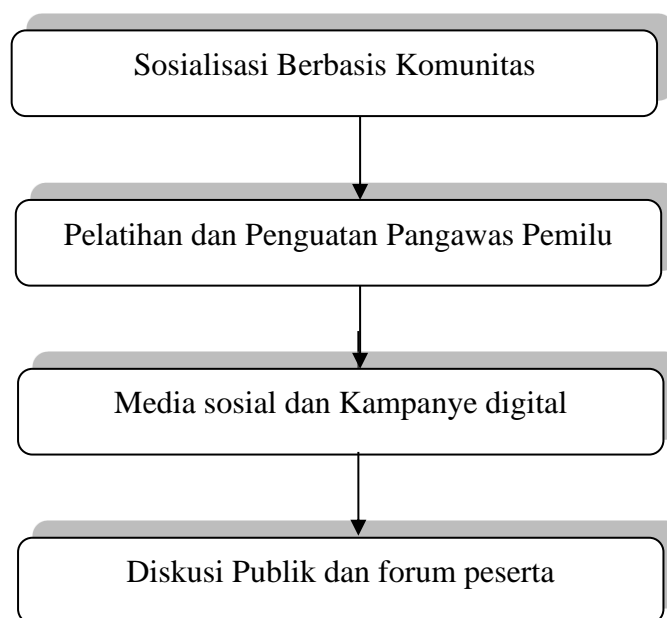
Dengan terlaksananya program ini, diharapkan masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif dalam politik, tetapi mampu berperan sebagai agen perubahan yang aktif. Partisipasi politik yang berbasis kesadaran kelas akan memberikan dampak jangka panjang terhadap proses demokrasi di Kabupaten Buton Selatan, menciptakan masyarakat yang lebih kritis, mandiri, dan tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan elite. Pilkada Serentak 2024 bukan hanya momentum untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga kesempatan untuk membangun demokrasi yang lebih substansial, di mana rakyat benar-benar memiliki kontrol atas jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat perjuangan bagi kelas masyarakat yang lebih luas.

METHOD

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kualitatif yang berbasis pada analisis teori sosialisme Marxist. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami struktur kelas dan kekuasaan yang berperan dalam proses partisipasi

politik masyarakat. Pendekatan ini mengkaji ketimpangan politik yang terjadi akibat dominasi kelompok elite dalam struktur kekuasaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat kelas bawah. Analisis ini bertujuan untuk menyusun materi sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan peran kelas sosial dalam pemilu dan Pilkada.

Pendekatan yang digunakan dalam PkM ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Neuman (2014) pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat. Dalam proses kegiatan ini penguatan kapasitas yang analisis adalah promosi digital pada UMKM di Kabupaten Buton Selatan. Adapun prosedur pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Teknik analisis data yang dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni:

- a. Analisis Deskriptif Kualitatif. Data yang diperoleh dari diskusi, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul.
- b. Evaluasi Kegiatan. Menggunakan metode evaluasi partisipatif untuk mengukur dampak. analisis data difokuskan pada apakah terjadi peningkatan partisipasi politik dan kesadaran kritis mengenai kelas sosial dalam politik.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Peningkatan Pengetahuan Politik Masyarakat.

Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan politik masyarakat Kabupaten Buton Selatan, terutama terkait dengan hak pilih, pentingnya partisipasi dalam Pilkada, dan pengaruh kelas sosial dalam proses politik. Sebelum sosialisasi, banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami konsep dasar hak pilih, serta hubungan antara kekuasaan politik dan struktur kelas sosial dalam demokrasi. Namun, setelah mengikuti sosialisasi berbasis perspektif sosialisme Marxist, mereka mulai memahami bagaimana kelas sosial yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan politik dan siapa yang diuntungkan dalam sistem demokrasi yang ada.

Peningkatan ini terlihat jelas dalam hasil survei pre-test dan post-tryout, di mana peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kekuasaan politik seringkali didominasi oleh kelompok elite yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Sosialisasi yang mengintegrasikan teori sosialisme Marxist dalam konteks politik lokal membantu masyarakat melihat Pilkada bukan hanya sebagai proses pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil.

Partisipasi Aktif Dalam Pemilu dan Pengawasan Pilkada

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi tidak hanya dalam memilih pemimpin, tetapi juga dalam mengawasi jalannya Pilkada. Berdasarkan hasil pelatihan pengawasan pemilu yang diadakan oleh Panwaslu, banyak peserta yang mengaku merasa lebih percaya diri dalam melakukan pengawasan selama Pilkada. Mereka tidak hanya memahami mekanisme pengawasan, tetapi juga menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga transparansi dan integritas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam Pilkada telah meningkat, yang berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal.

Media sosial dalam menyebarkan Informasi

Sosialisasi yang menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye digital juga menunjukkan hasil yang positif. Melalui seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Panwaslu Kecamatan Batuatas dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk

mereka yang mungkin tidak dapat hadir langsung dalam penyuluhan tatap muka. Konten-konten edukatif mengenai hak pilih, pentingnya partisipasi dalam Pilkada, dan pengawasan pemilu mendapatkan respons yang signifikan, dengan ribuan tayangan dan interaksi berupa like, parcel, dan komentar.

Namun, meskipun sensitive sosial membantu memperluas jangkauan, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa informasi yang disebarakan benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital. Oleh karena itu, meskipun media sosial efektif sebagai alat penyuluhan, masih diperlukan upaya tambahan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui metode tradisional seperti penyuluhan langsung dan forum warga.

Keterlibatan kelompok terpinggirkan dalam proses pilkada

Hasil yang paling signifikan dalam konteks sosialisasi ini adalah meningkatnya keterlibatan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, kelompok-kelompok seperti pemilih muda, perempuan, dan masyarakat berpendapatan rendah sering kali tidak terlibat secara aktif dalam proses politik. Namun, setelah mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya hak pilih mereka dalam demokrasi, banyak dari mereka yang mengungkapkan keinginan untuk lebih aktif dalam Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas.

Sosialisasi yang berbasis pada perspektif sosialisme Marxist membantu mereka memahami bagaimana struktur kelas dan kekuasaan dapat memengaruhi hidup mereka, serta bagaimana partisipasi mereka dalam Pilkada dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan kelas bawah. Peningkatan jumlah pemilih muda dan perempuan yang berpartisipasi dalam Pilkada menunjukkan bahwa program ini berhasil menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan (Brown, 2020).

Dampak jangka Panjang pada demokrasi local

Program sosialisasi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap proses demokrasi di Kabupaten Buton Selatan. Selain meningkatkan partisipasi politik, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran politik yang lebih kritis di kalangan masyarakat. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya populis, tetapi yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Dengan demikian, konsep partisipasi politik yang diperkenalkan dalam sosialisasi ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx mengenai

bagaimana kelas sosial memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan politik. Dalam pandangan Marx, negara dan institusi politik sering kali mencerminkan kepentingan kelas yang dominan, yakni kaum borjuis atau elite politik yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Oleh karena itu, kesadaran politik di kalangan masyarakat kelas bawah bukan hanya sekadar meningkatkan angka partisipasi dalam Pilkada, tetapi juga menjadi bentuk perjuangan untuk mendekonstruksi dominasi kelas penguasa dan menciptakan tatanan politik yang lebih demokratis serta berorientasi pada kepentingan rakyat (Paxton et al, 2020).

Selain itu, teori false consciousness yang dikemukakan oleh Marx juga relevan dalam konteks ini. Sebelum adanya sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pilihan politik mereka sering kali dipengaruhi oleh narasi yang dikendalikan oleh elite politik, seperti politik identitas, patronase, dan mobilisasi berbasis kepentingan jangka pendek. Dengan adanya edukasi politik berbasis sosialisme Marxist, masyarakat diajak untuk mengembangkan *class consciousness* (kesadaran kelas), di mana mereka dapat memahami bagaimana kepentingan mereka sebagai kelas pekerja atau masyarakat marjinal sering kali diabaikan dalam kebijakan yang dibuat oleh elite politik. Kesadaran ini memungkinkan mereka untuk lebih kritis dalam menilai kandidat, tidak hanya berdasarkan popularitas atau janji kampanye, tetapi juga berdasarkan rekam jejak dan komitmen terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat (Karatzogianni dan Matthews, 2023).

Dalam konteks pengawasan Pilkada, teori state and power dari Fuentes (2014) yang mengembangkan konsep hegemoni juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dapat mengubah dinamika politik lokal. Disamping itu menurut Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan yang diperoleh dari masyarakat melalui institusi politik, pendidikan, dan media. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dominasi kekuasaan yang selama ini hanya berpihak pada kelompok elite dapat dikurangi, karena masyarakat kini memiliki alat untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin yang terpilih.

Dengan kata lain, sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pondasi bagi perubahan sosial-politik yang lebih besar. Jika kesadaran politik berbasis kelas ini terus berkembang, maka masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang aktif setiap lima tahun sekali, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak politik mereka, dan

menantang struktur kekuasaan yang selama ini cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Inilah yang menjadi esensi dari perjuangan demokrasi dalam perspektif sosialisme Marxist, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sadar, berdaya, dan tidak lagi tunduk pada hegemoni kelas penguasa yang mendominasi ruang politik.

Gambar 1: Pemaparan Materi Seminar



Sumber : Tim PkM Universits Muhammadiyah Buton 2025

Gambar 2: Diskusi Peserta Seminar



Sumber : Tim PkM Universits Muhammadiyah Buton 2025

CONCLUSION

Sosialisasi partisipasi politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Buton Selatan, yang berlandaskan perspektif kelas dan kekuasaan dalam teori sosialisme Marxist, telah berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini cenderung terpinggirkan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga menyadari bagaimana struktur kekuasaan dan kepentingan kelas sosial memengaruhi dinamika politik lokal. Kesadaran ini memungkinkan mereka untuk lebih kritis dalam menilai kandidat, serta lebih aktif dalam mengawal jalannya Pilkada agar berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Lebih lanjut, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada angka partisipasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kelas (*class consciousness*). Hal ini penting dalam melawan false consciousness, di mana selama ini masyarakat sering kali dipengaruhi oleh narasi elite politik yang tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai hubungan antara kelas sosial dan politik, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan kepentingan mereka di ruang demokrasi.

Dari perspektif teori Marxist, partisipasi politik yang lebih aktif dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk melawan dominasi kelas penguasa yang selama ini mengendalikan kebijakan dan struktur politik. Dalam konteks ini, program sosialisasi telah membantu membangun kesadaran bahwa demokrasi tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial lima tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai perjuangan terus-menerus untuk menciptakan tatanan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hasil dari sosialisasi ini juga menunjukkan bahwa strategi berbasis edukasi politik yang menggunakan berbagai pendekatan, termasuk mass medium sosial dan forum diskusi langsung, efektif dalam menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Meski demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dari kesadaran politik yang telah terbentuk agar tidak hanya berlangsung dalam periode Pilkada, tetapi juga menjadi bagian dari budaya politik masyarakat yang lebih kritis dan partisipatif dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Buton Selatan. Jika pendekatan serupa diterapkan secara lebih luas, bukan tidak mungkin struktur politik yang selama ini

didominasi oleh elite dapat mengalami perubahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan esensi perjuangan sosialisme Marxist dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universits Muhammadiyah Buton yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terimakasih kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Buton Selatan yang menjadi mitra Program dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, Terima kasih juga kepada Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

REFERENCES

- Brown, W. (2020). *STATES OF INJURY: POWER AND FREEDOM IN LATE MODERNITY*. Princeton University Press.
- Friedgut, T. H. (2014). *POLITICAL PARTICIPATION IN THE USSR* (Vol. 112). Princeton University Press.
- Fuentes-Ramírez, R. R. (2014). MARXIST PERSPECTIVES ON TWENTY-FIRST CENTURY TRANSITION TO SOCIALISM. *Socialism and Democracy*, 28(1), 123-142.
- Karatzogianni, A. and Matthews, J. (2023). MOVEMENT LEADERSHIP IN CONTEXT: 1960S TO PRESENT DAY", *FRACTAL LEADERSHIP (DIGITAL ACTIVISM AND SOCIETY: POLITICS, ECONOMY AND CULTURE IN NETWORK COMMUNICATION)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 11-64.
- Neuman, W.L. (2014). *SOSIAL RESEARCH METHODS: QUALITATIF AND QUANTITATIF APPROACH*, 7ED. Sage Publication, London.
- Paxton, P., Hughes, M. M., & Barnes, T. D. (2020). *WOMEN, POLITICS, AND POWER: A GLOBAL PERSPECTIVE*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Plys, K., Priyansh, and Goonewardena, K. (2023). MARXIST THEORY UNBOUND: GLOBAL PERSPECTIVES FROM SOUTH ASIA", Plys, K., Priyansh and Goonewardena, K. (Ed.) *Marxist Thought in South Asia (Political Power and Social Theory, Vol. 40)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 1-17.

- Shofia, N., dan Alamsyafi, M. Z. (2019). EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 60-74.
- Sabry, M.I. (2018). BETWEEN SOCIAL DEMOCRACY AND COMMUNISM: AN INSTITUTIONAL AND SOCIOECONOMIC PERSPECTIVE, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 38 No. 9/10, pp. 698-721.